

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara berbentuk republik yang mempunyai wilayah yang sangat luas. Sehingga otonomi daerah atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintahan dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik di segala bidang atau pun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayahnya. Dengan adanya desentralisasi tersebut diharapkan beban pemerintah dalam mengelola urusan publik akan berkurang dan diharapkan juga akan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Smith (1985) dalam Risna Rahmawati (2007:1) mengemukakan bahwa:

Desentralisasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk memobilisasi dukungan terhadap pembangunan nasional dengan membuatnya lebih populer di tingkat daerah serta untuk memperoleh partisipasi yang lebih besar dari golongan masyarakat yang berbeda.

Dengan demikian maka masyarakat daerah akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan lokal serta kesempatan untuk membangun daerahnya sendiri.

Kaho (2001) dalam Risna Rahmawati (2007:1) menyatakan bahwa 'salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik, sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku'.

Dalam hubungannya dengan keuangan daerah ini, dalam UU no. 25 tahun 1999, yang termasuk dalam sumber-sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah (pasal 3), berikut ini sumber-sumber penerimaan daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); merupakan pendapatan daerah dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan; dana ini merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Berkenaan dengan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pengelolaan daerah dan berhubungan dengan penerimaan dari sumber daya alam yang dimiliki daerah, maka penulis melihat adanya keterkaitan antara penerimaan dari sektor pariwisata dengan jumlah penerimaan yang diperoleh daerah khususnya di Kabupaten Cianjur.

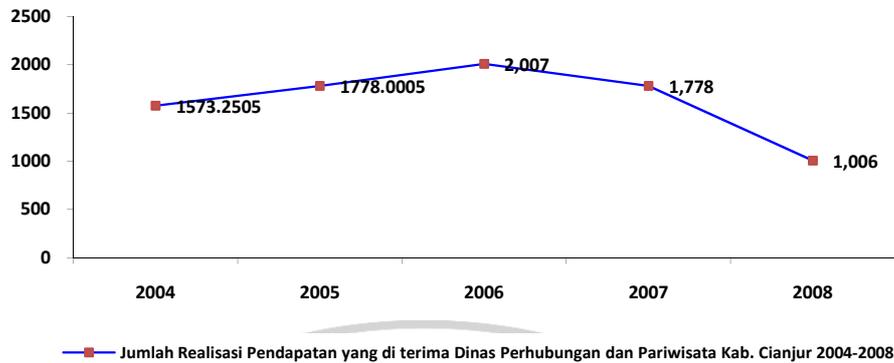
Sebagaimana kita ketahui bahwa alam merupakan sumber daya yang tidak ternilai harganya, kita dapat menikmati dan memperoleh semua yang kita butuhkan dari alam, baik untuk kegiatan ekonomi, sosial budaya, industri dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Keindahan alam yang ada di Indonesia merupakan aset bagi negara dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber penghasilan negara yang diperoleh dari kegiatan pariwisata.

Keberadaan Kabupaten Cianjur yang penuh dengan tempat tujuan wisata alam dan wisata budaya tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan domestik maupun asing. Jumlah wisatawan yang datang akan mempengaruhi jumlah pendapatan daerah yang diterima Kabupaten Cianjur dari sektor pariwisata. Pendapatan yang diterima tersebut akan menjadi bagian penting dari APBD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan khususnya untuk mengembangkan fasilitas umum dan penataan lingkungan yang nantinya juga akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah jumlah realisasi pendapatan yang diterima Kabupaten Cianjur dari sektor pariwisata periode 2004-2008:

TABEL 1.1
Jumlah Realisasi Pendapatan yang diterima Dinas Perhubungan dan
Pariwisata (Sub Dinas Pariwisata) Kabupaten Cianjur Tahun 2004-2008

Tahun	Jumlah (Rp)
2004	1.573.250.500
2005	1.785.265.000
2006	2.007.407.500
2007	1.778.000.500
2008	1.005.846.000

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dishubpar Kab. Cianjur Tahun 2004-2008 (diolah)



Gambar 1.1
Grafik Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata yang diterima Dinas
Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur Tahun 2004-2008
(Dalam Jutaan Rupiah)

Dari tabel dan gambar 1.1 terlihat adanya penurunan jumlah pendapatan yang diterima dari sektor pariwisata Kabupaten Cianjur. Penurunan jumlah pendapatan terjadi pada tahun 2007 yaitu dari sebesar Rp.2.007.407.500 pada tahun 2006 menjadi Rp.1.778.000.500 pada tahun 2007. Kemudian penurunan jumlah pendapatan kembali terjadi pada tahun 2008, yaitu dari Rp.1.778.000.500 pada tahun 2007 menjadi Rp.1.005.846.000 pada tahun 2008.

Turunnya jumlah pendapatan yang diterima dari sektor pariwisata Kabupaten Cianjur menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur disebabkan oleh beberapa alasan baik ekonomis maupun non ekonomis, faktor-faktor tersebut antara lain adalah :

- 1) Dibukanya jalur tol Cipularang. Jalan tol ini menghubungkan arus transportasi dari Kota Jakarta menuju Kota Bandung atau sebaliknya tanpa melalui Kabupaten Cianjur. Sehingga Kota Kabupaten Cianjur menjadi jarang dilalui oleh para pelancong.

- 2) Upaya promosi yang terhambat karena ketidakstabilan harga BBM
- 3) Situasi nasional yang menyangkut keamanan dengan adanya ledakan bom Bali. Banyak negara yang memberlakukan *travel warning* sejak terjadinya ledakan hingga proses eksekusi pelaku. Sehingga jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia kurang dari 15 ribu sejak tahun 2005.

Dunia pariwisata memiliki tantangan tersendiri terutama dari segi usaha. Produk wisata merupakan produk yang memiliki resiko besar. Hal tersebut dikarenakan industri wisata memerlukan penanaman modal yang cukup besar, sedangkan permintaannya sangat peka terhadap situasi ekonomi, politik, selera masyarakat dan lain sebagainya. Perubahan tersebut dapat menggoyahkan sendiri-sendiri penanaman modal usaha kepariwisataan karena dapat mengakibatkan kemunduran usaha, sedangkan produk pariwisata sendiri relatif lambat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasar. Kemunduran tidak hanya terjadi pada industri pariwisata, tetapi melibatkan pula industri penunjang wisata, yaitu suatu perusahaan industri yang pertumbuhannya sangat tergantung pada pertumbuhan industri wisata seperti pengrajin, penjual cendera mata, sanggar seni dan lainnya.

Sektor pariwisata kini telah menjelma sebagai sebuah industri, jadi sama halnya dengan industri-industri lain yang dalam pengelolaannya membutuhkan suatu kegiatan untuk memperoleh pendapatan. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan upaya promosi, hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan permintaan jasa.

Maka promosi pariwisata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Untuk dapat

menarik minat para wisatawan, pemerintah daerah setempat perlu melakukan kegiatan promosi. Kegiatan promosi tidak bisa lepas dari dana atau biaya yang dalam penggunaannya dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Mengingat jumlah wisatawan yang datang dan berkunjung mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata, maka pemerintah daerah harus memperhatikan faktor promosi dengan baik dan benar. Promosi pariwisata merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membuat konsumen tertarik dengan produk jasa pariwisata yang ditawarkan oleh pengelola dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata agar dapat berkunjung ke daerah tujuan wisata.

Promosi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan minat calon wisatawan dengan segala cara yang dirasakan dapat menguntungkan para wisatawan tanpa merugikan pihak produsen. Tentunya promosi yang diberikan telah dipertimbangkan dengan matang. Jika promosi dilakukan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung sehingga jumlah pendapatan dari sektor pariwisata juga akan meningkat. Kegiatan promosi akan menimbulkan konsekuensi pengeluaran beban yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul :

“Pengaruh Beban Promosi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata”.

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran beban promosi pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Cianjur .
2. Bagaimana pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bagaimana pengaruh beban promosi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Cianjur

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah maka diperlukan pula pemecahan atas masalah tersebut. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis dimaksudkan untuk mengetahui gambaran seberapa besar pengaruh beban promosi pariwisata terhadap hasil pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Cianjur.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana beban promosi pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Cianjur .

2. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh beban promosi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Cianjur

1.4 Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian dapat dicapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan atau manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis yang berupa sumbangan penelitian bagi ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dengan kajian pentingnya beban promosi untuk meningkatkan hasil pendapatan asli daerah sektor pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini antara lain sebagai bahan informasi bagi pengembangan sektor pariwisata, antara lain:

- a. Sumbangan pemikiran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pariwisata dengan mempertimbangkan beban promosi pariwisata.

- b. Bahan pemasukan bagi para tingkatan manajerial pemerintahan, dalam membuat pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pada periode berikutnya khususnya yang berkaitan dengan beban promosi pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pariwisata.
- c. Bahan acuan bagi siapa saja yang tertarik dengan masalah ini sebagai manivestasi dari ilmu akuntansi khususnya kajian sektor publik.

